Lampiran I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2013

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2013

Nomor : ...........................................

Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas

Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh

bagi Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.........................................

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ........................ tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : ................................................................................

NPWP : \_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,\_\_,

Alamat : ................................................................................

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal .....................................................1) karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.2)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.........., ...................20......

Pemohon, 3)

(......................................)

1) diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)

2) syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas.

3) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak